

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM  
PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK  
DI KEC. BANGKURUNG KAB. BANGGAI LAUT**

**OLEH**

**MOHAMMAD SIGIT A. BAKALOKON**

**S211 50 44**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU ( S-1 ) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM**  
**PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK**  
**DI KEC. BANGKURUNG KAB. BANGGAI LAUT**

Oleh  
**MOHAMMAD SIGIT A. BAKALOKON**  
NIM: S2115044

**SKRIPSI**

Telah Disetujui dan Siap Untuk Diseminarkan  
Gorontalo, 7 April 2020

Menyetujui

**PEMBIMBING I**



Marten Nisi, S.IP, M.AP  
NIDN: 0901038502

**PEMBIMBING II**



Deliana Vita Sari Djakaria S. IP, M. IP

Mengetahui,

**Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Sosial dan Ilmu Politik**



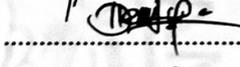
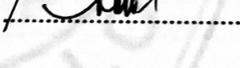
Martini Abi, S.IP., M.AP  
NIDN: 090104076701

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN  
PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KEC. BANGKURUNG KAB.  
BANGGAI LAUT

Oleh  
MOHAMMAD SIGIT A. BAKALOKON  
NIM S2115044

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ihsan Gorontalo

1. Marten Nusi, S.IP, M.AP 
2. Deliana Vita Sari Djakaria, S. IP, M. IP 
3. Dr Bala Bakri, SE., S.IP., S.Psi., MM 
4. Novalliansyah Abdussamad, S. IP., MA 
5. Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik



Ketua Program Studi



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Moh Sigit A. Bakalokon

**NIM** : S2115044

**Program studi** : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “ **Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan. Bangkurung Kab. Banggai Laut** ” adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah dan blum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Ichsan maupun di perguruan tinggi yang lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikamudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya siap menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**Moto :**

**“ Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya  
beserta kesulitan itu ada kemudahan ”**

(QS. Al-Insyirah, Ayat 5-6)

**Karya Tulis Ini Kupersembahkan Kepada :**

Kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan penulis, Ayahanda  
tercinta **Arpan Bakalokon** serta ibunda tersayang **Nurmila Latere**

**A**

**L**

**M**

**A**

**M**

**A**

**T**

**E**

**R**

**K**

**U**

**TERCINTA**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

## **ABSTRAK**

Moh Sigit A. Bakalokon. S2115044. Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut. (Pembimbing I, Marten Nusi S.IP, M.AP, Pembimbing II Deliana Vitasari Djakari S. IP, M. IP) Program Studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Rumusan Masalah 1. Bagaimana peran dan fungsi Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kec Bangkurung Kab Banggai Laut 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengendalian pertumbuhan penduduk di Kec Bangkurung Kab Banggai Laut. Sedangkan Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui data dan informasi peran dan fungsi pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kec Bangkurung Kab Banggai Laut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Peneliti ingin melihat bagaimana cara pemerintah menanggulangi pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Sebagai kesimpulan dari penelitian adalah 1. Peran dan fungsi pemerintah menanggulangi pertumbuhan penduduk di Kec Bangkurug Kab Banggai Laut sejauh ini belum maksimal karena dipengaruhi oleh kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat, rendahnya sumber daya manusia, perpindahan penduduk 2. Faktor lain ialah pencegah angka kelahiran, MKJP, angka partisipasi pria masih kurang.

Kata Kunci : Peren dan Fungsi Pemerintah, Pertumbuhan Penduduk.

### **ABSTRACT**

Moh Sigit A. Bakalokon. S2115044. Analysis of the Government's Role in Population Growth Control in Kec. Bangkurung Regency. Proud of the Sea. (Supervisor I, Marten Nusi S.IP, M.AP, Supervisor II Deliana Vitasari Djakari S. IP, M. IP) S1 Study Program Government Department, Faculty of Social and Political Sciences, Ichsan University, Gorontalo. This research was carried out based on the Problem Formulation 1. How is the role and function of the Family Planning Agency in controlling population growth in Bangkurung Subdistrict, Banggai Laut Regency 2. What factors influence population growth control in Bangkurung Subdistrict Banggai Laut District. While the purpose of this research is to find out data and information on the role and function of government in controlling population growth in Bangkurung District, Banggai Laut Regency. The research method used is a qualitative approach. Researchers want to see how the government cope with the rapidly growing population.

The conclusions of the study are: 1. The role and function of the government in tackling population growth in Bangkurug Subdistrict, Banggai Laut Regency so far has not been optimal because it is influenced by the lack of awareness of the community, low human resources, population movement 2. Another factor is the prevention of birth rates, MKJP , male participation rates are still lacking.

Keywords: Government Peren and Function, Population Growth.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun usulan proposal penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kec. Bangkurunng Kab. Banggai Laut”** sesuai dengan yang direncanakan.

Usulan ini dibuat untuk memenuhi sala satu syarat untuk mengikuti ujian Proposal. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, usulan penelitian ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Dr Arman, M.SI. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Marten Nusi, S.IP., M.AP, Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan petunjuk bagi penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini, Ibu Deliana Vita Sari Djakaria S.IP., M.IP. Selaku pembimbng II saya yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Dan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyusun usulan penelitian ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan minimnya pengalaman yang penulis miliki. Olehnya, saran dan kritik, penulis harap kindari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan proposal dan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Mei,2020

Moh. Sigit A. Bakalokon

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1. Maksud Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Pengertian Peran Pemerintah .....	8
2.2. Peran Pemerintah Daerah.....	11
2.3. Peran Pemerintahan Desa.....	14
2.4. Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk .....	15
2.5. Kerangka Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	20
3.1. Objek Penelitian .....	20
3.2. Jenis Penelitian .....	20
3.3. Fokus Penelitian .....	21
3.4. Informan.....	21
3.5. Jenis Data .....	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7. Teknik Anaisis Data .....	23

BAB IV PEMBAHASAN.....	24
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	24
4.2. Program dan Fungsi KB .....	28
4.3. Visi dan Misi.....	34
4.4. Deskripsi Hasil Penelitian.....	34
4.5. Peran, Fungsi, BKB Terhadap Pertumbuhan Penduduk.....	35
4.6. PEMBAHASAN .....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	50
5.1. Kesimpulan .....	50
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52
DAFTAR LAMPIRAN.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pengembangan populasi dan perkembangan keluarga, populasi adalah masalah yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, distribusi, mobilitas, distribusi, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, budaya sosial, agama dan lingkungan populasi. Seperti yang kita ketahui masalah populasi telah menjadi perhatian manusia sejak dahulu kala negarawan dan kelompok ahli telah sering berbicara tentang banyaknya populasi yang diinginkan dan bagaimana bisnis untuk merangsang atau memperlambat pertumbuhan populasi.

Karena negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, menurut sumber data yang diambil dari "Tribunnews.com." Negara Indonesia berada di posisi keempat dari banyak negara di dunia, yang berjumlah 237,6 juta orang. Dari hasil data di atas, pemerintah harus mengambil tindakan untuk meminimalkan jumlah pertumbuhan populasi yang semakin tinggi, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menegakkan peran lembaga atau lembaga yang kompeten dalam menangani pertumbuhan populasi.

Sebelumnya kita juga harus mengetahui beberapa dampak positif dan negatif pertumbuhan penduduk, agar kita lebih menambah wawasan pengetahuan pertumbuhan populasi. Dampak positif peningkatan Sumber Daya Alam SDM

peningkatan kualitas produk, peluang kewirausahaan yang lebih besar, peningkatan solidaritas antar negara, peningkatan inovasi kerja, karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dampak negatif dari meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kejahatan, meningkatnya kemiskinan, kesehatan masyarakat akan menurun, jumlah limbah dan polusi, pengembangan tidak layak huni.

Disamping itu pemerintah harus membuat tahapan demi tahapan untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang semakin berubah-ubah, oleh karenanya pemerintah harus memulai proses untuk menggunakan perbandingan populasi setiap individu yang berada di suatu wilayah khususnya di Daerah Banggai Laut terlebih di Kec Bangkurung, untuk melakukannya perlu di hitung berapa jumlah perbandingan individu dalam suatu populasi yang berada didaerah tersebut.

Sala satu hal yang dapat di lakukan pemerintah ialah melakukan atau memberikan sosialisasi serta terjun langsung untuk melakukan langkah-langkah dalam menggunakan pola pikir yang baik untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk, langkah-langkah yang dimaksud ialah mengadakan sosialisasi dengan Badan Keluarga Berencana kepada masyarakat yang membahas program diantaranya program dua anak cukup, kurang gizi stunting, menanggulangi kemiskinan, serta anak-anak yang putus sekolah.

Untuk menunjang terlaksananya program ini, masyarakat juga harus berpartisipasi agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga program – program yang di laksanakan oleh pemerintah terlaksana dengan baik atau paling tidak sesuai

dengan yang diharapkan. Untuk mendukung program yang dibahas diatas Pemerintah menggunakan konsep penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan untuk Dana Desa tidak tersedianya anggaran mengenai perancangan Keluarga Berencana (KB). Dari uraian diatas data yang saya dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kec Bangkung jumlah penduduk pada tahun 2015, mencapai 8.582 jiwa dan pada tahun 2016, mencapai 8.699 jiwa serta tahun 2017, 8.818 dan 2018 mencapai 8.932 jiwa bersumber dari Kecamatan Bangkurung Dalam Angka 2019.

Dari jumlah di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kec Bangkurung mengalami kenaikan sehingga berdampak dari laju pertumbuhan itu sendiri. Maka dari itu pemerintah setempat mengupayakan agar kiranya dapat mengatasi permasalahan yang ada, serta dibarengi dengan adanya pertumbuhan penduduk yang kurang kondusif apalagi ditambah dengan persoalan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Ditambah lagi dengan angka atau jumlah penduduk yang semakin pesat, serta masih banyaknya anak-anak yang mengalami stunting kurang gizi, kemiskinan meningkat dan masi banyak juga yang putus sekolah. Sehingga ini merupakan tugas untuk pemerintah untuk bermitra dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) menangani permasalahan yang ada.

Menurut Rasyid dalam Soares, Armando dkk (2015:234) mengatakan bahwa pelaksanaan pemerintah tugas dan fungsi utama yang diatur oleh peraturan

yang ditentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi utama tergantung pada pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilakukan dan dilaksanakan ada fungsi layanan (pemberdayaan), pemberdayaan, dan pengembangan.

Dalam hubungan ini, ditekankan bahwa pelayanan yang baik akan membawa keadilan bagi orang-orang bangsa dan negara dan tugas pelayanan adalah bahwa itu tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka untuk pencapaian tujuan bersama.

Sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan tugasnya ialah untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat, melakukan peningkatan masyarakat miskin yang didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dan kemakmuran di masyarakat. Tugas pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arahan untuk menyeimbangkan implementasi melalui penerbitan peraturan.

Sebagai regulator pemerintah yang memberikan referensi dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur semua kegiatan pemberdayaan, pemerintah sebagai dinamist adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam hal hambatan dalam proses pembangunan untuk mendorong dan menjaga dinamika pembangunan daerah.

Pemerintah telah menyikapi hal ini dan merasa terbantu karena adanya lembaga Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dimana dapat mengontrol pertumbuhan penduduk, Kalau di Kec Bangkurung BKKBN dirubah melalui kesepakatan musyawarah bersama dari hasil kesepakatan itu maka diberi nama Balai Penyuluh Pos Keluarga Berencana Kec Bangkurung berdasarkan uraian data diatas smaka penulis mengambil judul **Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena di latar belakang yang telah ditulis diatas maka pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Badan Keluarga Berencana (BKB) dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kec. Bangkurung Kab Banggai Laut?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi proses pengendalian pertumbuhan penduduk di Kec. Kabupaten Bangkurung, Banggai Laut?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Adapun maksud diadakannya peneitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh dan menganalisa data peran dan fungsi Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kec. Bangkurung Kab Banggai Laut.
2. Untuk memperoleh dan menganalisa data faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengendalian pertumbuhan penduduk di Kec. Kabupaten Bangkurung, Banggai Laut.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kec. Bangkurung Kab Banggai Laut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengendalian pertumbuhan penduduk di Kec. Bangkurung Kab Banggai Laut.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat teoritis
  - Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan konsep bagi perkembangan yang ada di Kec. Bangkurung.
  - Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan salah satu bahan acuan peneliti-penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat praktis

- Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi atau masukan mengenai peran pemerintahan dengan adanya perkembangan yang independensi dalam mengelola pertumbuhan penduduk.
- Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi mengetahui peran pemerintahan yang di programakan di kalangan masyarakat.
- Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan baru mengenai independensi dan penerapan peran pemerintahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kec. Bangkurung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Peran Pemerintah**

Sebelum kita membahas tentang Peran Pemerintah alangkah baiknya peneliti mengetahui apa itu peran dan pemerintah, sebagaimana yang di bahasakan bahwa peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Menurut Soekamto dalam Arifin, dkk (2013:128) mengatakan bahwa peran merupakan suatu perilaku yang penting bagi struktur sosial.

Menurut Subakti dalam Rahman (2018:2) Pemerintah secara etimologis berasal dari kata Yunani, 'kubernian' atau nahkoda kapal. Artinya menghadap ke depan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Arifin, dkk (2013:128) mengatakan bahwa peran sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Menurut Martini dkk dalam Rahman (2018:2) mengatakan pemerintahan berasal dari kata 'perintah' kata perintah memiliki empat unsur:

- Ada dua pihak yang saling terkait
- Kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual
- Pihak yang memerintah memiliki kewenangan
- Pihak yang diperintah memiliki ketaatan

Sedangkan politik terkemuka Roy C Macridis dkk dalam Rahman (2018:3) mengatakan tata kelola adalah tindakan kehendak yang dapat mengubah kebijakan. Karena itu tugas pemerintah adalah mengidentifikasi masalah dan

mencari solusi. Sebagaimana yang dibahasakan bahwa dapat disimpulkan pemerintahan merupakan suatu proses yang dimana membahas tentang cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dalam berbagai bidang politik, ekonomi, administrasi dan lain sebagainya serta pandai mengelola urusan negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kemudian, Rosenthal dalam Rachmat dan Gunawan (2016:17) mengatakan bahwa pemerintahan adalah yang menggeluti tentang kinerja internal dan eksternal serta struktur dan proses-proses pemerintahan umum, pemerintan umum dapat diidentifikasi sebagai keseluruhan struktur dan proses keputusan-keputusan yang mengikat. Menurut Soemendar dalam Kencana Syafiie, dkk (2011:9) mengatakan bahwa pemerintah sebagai badan penting dalam kerangka pemerintahannya, juga perlu memperhatikan perdamaian dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat masyarakat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, komunikasi partisipasi semua lapisan masyarakat dan legitimasi.

Jadi, berdasarkan kutipan teori yang ada di atas maka dapat di simpukan bahwa peran pemerintahan merupakan suatu konsep perilaku atau tindakan yang dilakukan serta menjalankan wewenang dalam berbagai bidang poitik, ekonomi, administrasi, serta terstruktur yang terorganisir dengan baik. Peran pemerintahan tidak hanya berfokus pada tindakan saja atau melaksanakan wewenang yang telah di tetapkan, akan tetapi bagaimana bisa melakukan kerja sama dengan badan Keluarga Berencana KB untuk mengontrol dan mengawasi laju atau lambatnya pertumbuhan penduduk serta mengakomodir segala yang bersifat mensejahterkan

masyarakat. Agar terlaksananya kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah harus lebih efektif dan efisien. Terkhususnya di daerah-daerah yang berada di setiap republik ini, sebagaimana yang di bahas dalam Undang-undang yang mengatur peran pemerintahan daerah seperti yang terdapat pada UUD No 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara komposisi dan prosedur untuk administrasi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang;

- bahwa pelaksanaan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan dan keunikan suatu daerah. dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global di kesatuan sistem administrasi negara;

Hal diatas menunjukan peran pemerintahan sangat signifikan sehingga bersifat absolut. Oleh karenanya untuk mensejahterakan rakyat pemerintah harus mengakomodir dan membuat program-program untuk menunjang terlaksananya kegiatan yang telah di agendakan dan disepakati. Seperti yang telah diketahui

peran pemerintah disini terbagi atas dua yang dimana membahas tentang peran pemerintah pusat dan daerah akan tetapi peneliti hanya membahas pemerintah daerah saja, dikarenakan peran pemerintah ini lebih khususnya mengatur daerahnya sendiri dan lebih dekat ke ruang lingkup desa.

## **2.2. Peran Pemerintah Daerah**

Peran Pemerintah Daerah adalah administrasi urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Disamping itu pemerintah relatif mempermudah akses dalam bidang pembangunan dan perekonomian sehingga penduduk dapat mengembangkan sdmnya, apalagi di era jaman skarang penduduk yang ada di Indonesia semakin meningkat terkhususnya di tiap-tiap daerah.

Oleh karena kita bisa melihat peran pemerintah dalam menanggulangi hal ini, yang di mana pemerintah bekerja sama dengan suatu lembaga oraganisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN), yang dibuat oleh pemerintah pusat. Seperti yang telah di tetapkan dalam UUD 1945 No 62. Tahun 2010 Pasal 2. Peraturan Presiden bahwasanya BKKBN memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian populasi dan keluarga berencana.

- Peran, Fungsi, Tugas Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dalam system ketatanegaraan Indonesia, adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan wakil negara. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah, memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Layanan (Fungsi Sertivicing) dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak memilih kasih, semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk disetujui, disetujui, diterima, diberi kesempatan, kepercayaan, dan sebagainya.
- Fungsi Pengaturan (Fungsi Pengaturan)
- Fungsi Pemberdayaan. Pemerintah dalam fungsi ini sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar untuk membantu setiap hidup.

Menurut Rasyid, Ryaas, dkk (2012:219) mengatakan bahwa pemerintah daerah harus kreatif, pembangunan daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal, dan unruk berinisiatif diperlukan kreatifitas dari para penyelenggara pemerintah. Jadi tugas dan peran pemerintahan daerah pada umumnya yaitu untuk mensejahterakan rakyat, yang di mana pemerintah menyediakan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan yang harus di aplikasikan.

Pemerintah daerah daerah juga mempunyai otonominya sendiri, dengan adanya otonomi daerah pemerintah harus mengambil langkah cepat membantu dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk digunakan secara efektif dan efesien guna terselenggaranya kegiatan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya.

Dengan demikian pemerintah daerah bisa mengembangkan sumber daya yang ada di daerah tekhususnya di setiap-setiap desa. Demi memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada umumnya di lingkungan atau wilayah yang di rencanakan dalam jangka waktu tertentu. Seperti dikutip oleh Riyandi dan Bratakusuma dalam Soares, Armando dkk (2015: 232) Pemerintah berperan penting dalam membuat tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dengan menyesuaikan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang diterapkan.

Sedangkan mengenai pengertian maka Ndraha dalam Soares, Armando dkk (2015: 233) mengatakan bahwa peran pemerintah dalam membangun masyarakat sangat luas, berawal dari hal yang menyangkut operasional sampai pada hal yang menyangkut ideologi dan spiritual dengan peran ini akan memerlukan wewenang dan kemampuan seseorang khusus untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemimpin, karena tanggung jawab dari tugas pokok dan fungsi sendiri dapat menyelesaikan perdebatan di lingkungan masyarakat juga pemerintah.

Rashid dalam Soares, Armando dkk (2015:234) mengatakan Karena pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pada pimpinannya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Dalam hubungan ini, pemerintah akan membuahkan keadilan bagi masyarakat dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian

masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Penelitian tedahulu

Judul	Metode Penelitian	Hasil	Oleh
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis data yang telah di dapatkan maka pemerintah memiliki tugas yang sangat berat dalam mengatasi lajut pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah membentuk suatu badan yang ditugaskan untuk mengatasi hal tersebut yaitu BKKBN dan sesuai dengan Pepres Nomor 62 Tahun 2010	Tatuhe, Stephen

tabel 1.1

### 2.3. Peran Pemerintahan Desa

Dalam pembahasan otonomi daerah sala satu komponen yang perlu dikembangkan di wilayah pedesaan, di dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 2015 tentang desa, memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk disetujui dan dibuat rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan

dengan sesuai dengan kesepakatan-hubungan demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Ulumiyah dkk (2014:1) mengatakan bahwa pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan menurut Siagani (2014:2) pembangunan suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju rangkaian pembinaan yang lebih baik.

#### **2.4. Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

##### **a. Pengertian Pertumbuhan Penduduk**

Menurut Undang-Undang No 59 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk merupakan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam batas waktu tertentu dapat dikatakan sebagai penduduk. Menurut Tatuhe Stephen dkk (2016:3) mengatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, sedangkan menurut Paul Edric dalam Tatuhe, Stephen dkk (2016:3) menggambarkan penduduk dan lingkaran yang didunia ini sebagai berikut. Pertama dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua keadaan bahan makanan sudah terbatas; Lebih dari satu manusia diduna ini, Lingkungan - Lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Sementara menurut Mantra Bagoes dalam Tatuhe, Stephen dkk (2016: 4) mengatakan bahwa

kerusakan dan pencemaran Lingkungan parah karena sudah banyak penduduk yang merisaukan.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk

Menurut Nyoman, Suartha (20016:6). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk:

1. Perpindahan Penduduk, hal ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, terkait dengan memenuhi kebutuhan hidup para migrasi.
2. Mortality (kematian), merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu dapat berupa penyakit, maupun sebab lainnya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk ialah badan Keluarga Berencana KB yang dimana membahas tentang program – program dan masalah mengenai pertumbuhan penduduk. Menurut Susi (2016:110) mengatakan bahwa:

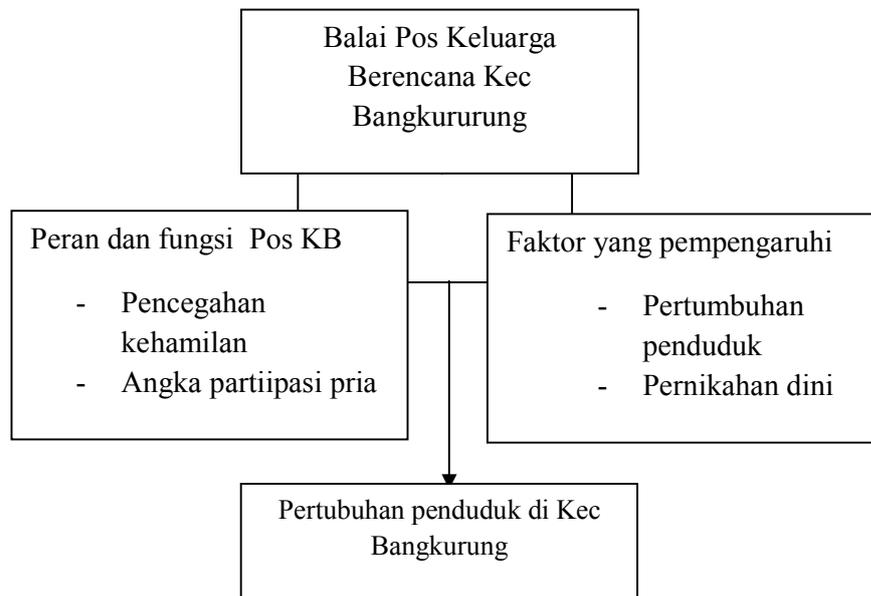
1. Keluarga Berencana KB merupakan program pemerintah untuk disetujui rumah tangga, kelahiran yang dapat menundah kehamilan, jarak anak yang diinginkan untuk pertumbuhan penduduk.
2. Menggunakan beberapa jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP
3. Angka partisipasi pria, dalam menggunakan alat kontrasepsi di Indonesia masih sangat rendah peserta KB pada umumnya menggunakan kondom.

Penelitian sekarang

Judul	Metode Penelitian	Hasil	Oleh
Faktor – factor yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk Dan Implementasi Kebijakan Penduduk	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan objek penelitian diseluruh Kabupaten, sumber data primer dan sekunder baik bersifat kuantitatif dan kualitatif	Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan ialah terjadinya mortality, merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya, Perpindahan penduduk : factor – fator yang menyebabkan perpindahan penduduk biasanya dikategorikan	Nyoman, Suartha

		menjadi dua faktor yaitu factor penarik dan factor pendorong.	
--	--	---	--

## 2.5. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi Pos Keluarga Berencana dan faktor – faktor yang mempengaruhi peran pemerintah di Kec Bangkurung. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah selama tiga bulan.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara. Dalam survei informasi dikumpulkan menggunakan pedoman wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peran dan fungsi Pos Keluarga Berencana dan faktor – faktor yang mempengaruhi peran pemerintah di Kec Bangkurung.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam dan dapat ditemukan juga ditemukan terkait dengan sosial, data yang mempengaruhi keyakinan, kebiasaan mental dan budaya yang dianut oleh siapa saja dapat dikemukakan dengan jelas.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah: Peran dan fungsi Pos Keluarga Berencana ialah demi jumlah yang dapat dipikirkan, kelahiran yang dapat dikembalikan, jarak anak yang diinginkan untuk disetujui pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ialah pertumbuhan penduduk dan mortality (kematian) hal ini dipengaruhi oleh aspek pendapatan terkait dengan memenuhi kebutuhan hidup dan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh penyakit atau sebab lainnya.

### **3.4. Informan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Purposive sampling merupakan teknik menentukan informan dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu. Penentuan informan di atas, karena dianggap mereka mengetahui terhadap peran dan fungsi Balai Penyuluh Keluarga Berencana dan faktor – faktor yang mempengaruhi peran pemerintah di Kec Bangkurung.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri atas seorang Koordinator dan 3 orang pegawai yang berada di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kec Bangurung.

### **3.5. Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer. Data yang diperoleh secara langsung melalui informan (Ketua dan pegawai Pos Keluarga Berencana di Kec Bangkurung), yakni jawaban yang diberikan oleh para informan melalui hasil wawancara.
2. Sekunder data. Iyalah data yang suda ada dan diperoleh dilokasi penelitian yang dapat terdiri dari dokumen-dokumen yang memiliki hub dengan pertalian yang diperlukan, literatur-literatur dan lain-lain sebagainya.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data di tempat penelitian, maka diggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan diadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Menurut Arikunto (2006:156) observasi atau yang disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek yang menggunakan seluruh alat indra.
2. Wawancara yaitu merupakan suatu metode pengumpulan data dengan bertanya yang dipertanyakan kepada informan untuk mendapatkan lebih dari yang membantah yang disampaikan. Menurut Riduwan (2014:102) wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

### **3.7. Teknik Anaisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di kumpulkan melalui wawancara mendalam pada informan, dan data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif. Dimana analisis dilakukan terhadap seluruh temuan sesuai dengan tujuan yang akan dicap.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Menurut cerita penduduk setempat Kecamatan Bangkurung adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan ini beribu kota di desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung terdiri atas 12 Desa diantaranya, Desa Dungean, Sasabobok, Bungin Luean, Tabulang, Mbeleang, Lalong, Kanari, Taduno, Lantibung, Kalupapi, Bone-bone, dan Togong Sagu mayoritas masyarakat Kecamatan Bangkurung berpenghasilan nelayan dan petani, maklum saja di Kabupaten Banggai Laut hampir semua Kecamatan bermata pencaharian nelayan dan petani dikarenakan permukiman warganya bedekatan dengan laut.

Pertumbuhan penduduk disini juga cukup meningkat setiap tahunnya apalagi ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia sehingga bisa mengelola sumber daya alam dengan baik oleh karenanya pemerintah dalam hal ini pemerintah Kecamatan bekerja sama dengan BKKBN atau Balai Penyuluhan Pos Keluarga Berencana Kecamatan Bangkurung untuk bagaimana menekan laju pertumbuhan penduduk.

#### 1) Profil dan Letak Geografis Balai KB

Balai penyuluhan KB Kecamatan Bangkurung terletak di ibu kota Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tepatnya di depan Kantor Camat Bangkurung. Dibentuknya Balai ini guna untuk mensejahterahkan, memperlambat, menekan laju pertumbuhan penduduk.

Balai ini dibentuk pada tahun 2015, dimana balai ini terdiri dari 12 desa yang memiliki beberapa dusun terpisah sebagai wilayah kerja.



Gambar Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

## 2) Profil Bangunan

Jumlah ruangan:

1. Ruang kerja sekaligus ruang pertemuan 1 (satu)
2. Ruang kerja 1 (1)
3. Kamar Mandi (1)

### 1. Ruang pertemuan



## 2. Ruang kerja



## 4. Kamar mandi



## 3) Sumber Daya Manusia

### 1. Koordinator

Nama : **BURAHIM H. EDI, SKM**  
Tempat Tanggal Lahir : LALA, 19 OKTOBER 1991  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : **PLKB KONTRAK**  
Alamat : Desa Lala Kec. Bangkurung  
HP :  
Wilayah Binaan : Dungkean, Sasabobok, Bungin Luean,  
Tabulang, Mbeleang  
Status : Kawin



### 2. Nama : **SUPRIANTO LESSO, SKM**

Tempat Tanggal Lahir : Luwuk, 27 Februari 1989  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : **PLKB KONTRAK**



Alamat : Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung  
 HP :  
 Wilayah Binaan : Lantibung, Togong Sagu  
 Status : Kawin7207122702890001

3. Nama : **MUAMMAR MISRUN, S.Kep**

Tempat Tanggal Lahir : Kalumbatan, 06 Mei, 1996

NIP : -

Pangkat/Golongan : -

Jabatan : PLKB KONTRAK

Alamat : Desa Kalupapi, Kecamatan Bangkurung

HP : -

Wilayah Binaan : Bone-Bone, Kalupapi, Lalong

Status : Kawin



4. Nama : **HARTO TOMOGA**

Tempat Tanggal Lahir : Taduno, 05 Deseember 1982

NIP : -

Pangkat/Golongan : -

Jabatan : PLKB Kontrak

Alamat : Desa Taduno Kc. Bangkurung

HP : -

Wilayah Binaan : Taduno, Kanari

Status : Kawin



### 3) Tabel Kegiatan Balai Penyuluhan KB

Tabel 1.3

No	Nama Kegiatan
1	Staff Meeting
2	Pengolahan Data
3	Penyuluhan KB
4	Pembinaan Kader
5	Pertemuan Tribina

## **4.2. Program dan Fungsi KB**

Pengertian Keluarga Berencana KB menurut UU No 10 tahun 1992 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah pembangunan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan zaman perkawinan (PUP) penguasaan, pembinaan keluarga, kesejahteraan dan sejahtera. Program KB adalah bagian dari (integral) dalam program pembangunan nasional dan pembangunan untuk pembangunan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat mencapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.

Karena Keluarga Berencana adalah program pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan jumlah penduduk, maka dari program KB ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang memenuhi. Perlu diakui, itulah Gerakan Keluarga Nasional Indonesia telah mempertimbangkan masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang dihasilkan. Perencanaan jumlah keluarga dengan ikatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi atau alat pencegah kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

### **a. Tujuan Keluarga Berencana**

Pasangan yang menggunakan KB tentu memiliki tujuan masing-masing. KB tidak hanya dilakukan untuk menambah jumlah kelahiran bayi, lebih jelasnya tujuan.

## 1. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendala pertumbuhan penduduk.

## 2. Tujuan Khusus

Meningkatkan Jumlah Penduduk serta Meningkatkan Alat Kontrasepsi, menambah Angka Lahir Bayi. Meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran, Manfaat KB untuk pasangan suami istri. Program Menjalani KB sangat bermanfaat untuk pasangan suami istri selain melahirkan, juga bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit hingga gangguan mental. Lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa Manfaat KB untuk pasangan suami istri

1. Menurunkan risiko kehamilan. Alat kontrasepsi untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Alat kontrasepsi juga berfungsi untuk mengurangi risiko tua atau terlalu tua. Jika perempuan yang terlalu tua dan belum menopause melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kontrasepsi, ada yang terjadi kehamilan. Melahirkan diatas usia 35 tahun akan beresiko pada wanita akan menyebabkan kematian.
2. Menurunkan risiko kanker pada wanita. Kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita seperti suntik, pil, atau IUD biasanya mengandung progesteron dan enkstrogen. Hormon ini dapat membantu wanita mengendalikan kehamilan dan menurunkan risiko kanker pada sistim

reproduksi. Kanker yang dapat diatasi oleh dua hormon tersebut adalah kanker indung telur atau (ovarium) dan kanker atau dinding rahim (endometrium). Program KB hormonal juga dapat menurunkan risiko tumbuhnya mioma dirahim.

3. Tidak membahas tumbuh kembang anak. Jika anak belum satu tahun memiliki adik, tumbuh kembang anak akan rusak. Normalnya jarak antara anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun, jika anak tidak setuju 2 tahun sudah punya adik ASI untuk anak tidak bisa penuh 2 tahun harus memperbaiki masalah kesehatan. Orang tua yang memiliki dua anak juga akan kesulitan membagi waktu. Maka anak yang lebih besar akan kurang perhatian, sedangkan anak kurang membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya.
4. Resiko radang panggul menurun. Hormon untuk KB bermanfaat menurunkan radang panggul, radang panggul akan menyerang daerah rahim, ovarium, dan daerah sekitar vagina lainnya. Jika Anda menggunakan program KB jenis implan, tubektomi juga dapat mengurangi risiko pada panggul yang dapat membahayakan nyawa wanita.
5. Menjaga kesehatan mental. Lebih banyak wanita yang mengalami depresi yang cukup hebat setelah mengalami depresi yang hilang jika mendapat dukungan dari pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak yang dekat, kemungkinan risiko depresi semakin besar juga

dapat terjadi pada ayah karena tidak siap secara fisik dan mental. Dua kondisi tersebut bisa dihilangkan dengan melakukan program Keluarga Berencana, jika melakukan pengaturan kehamilan, pasangan suami istri bisa hidup lebih sehat bahkan anak bisa tumbuh secara maksimal dan perencanaan kehamilan akan berjalan matang.

#### b. Manfaat KB Bagi Anak

Ternyata KB tidak hanya bermanfaat untuk pasangan suami istri, program Keluarga Berencana juga bermanfaat bagi anak-anak tetapi bukan berarti anak-anak program KB, ini dia manfaat KB untuk anak:

- Dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya
- Memperoleh perhatian pemeliharaan dan makanan yang cukup
- Perencanaan masa depan dan pendidikan yang baik

#### c. Jenis Alat Kontrasepsi

Seperti yang kita ketahui, ada banyak pilihan jenis kontrasepsi yang bisa dipilih beberapa jenis kontrasepsi yaitu:

- Pil (biasanya menyesuaikan) memiliki Manfaat tidak mengganggu hubungan seksual dan mudah melepaskan setiap saat, risikonya sangat kecil.
- Suntik KB (1 dan 3 bulan) jenis alat kontrasepsi yang satu ini biasanya dibilang sangat efektif (0,0,1-4 gaya per 100 wanita) selama tahun pertama menggunakan stuntik KB, alat kontrasepsi suntikan juga mengandung manfaat seperti tidak perlu menyimpan obat suntikannya dan jangka pemakaiannya bisa dalam jangka panjang.
- Implan (susuk) ini merupakan alat kontrasepsi yang digunakan di lengan

atas bawah kulit dan sering digunakan pada tangan kiri. Keuntungannya daya guna tinggi, tidak mengganggu produksi ASI dan pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan.

- AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) seperti namanya, AKDR adalah alat kontrasepsi yang digunakan dalam rahim, efek sampingnya sangat kecil dan mempunyai keuntungan efektivitas dengan proteksi jangka panjang 5 tahun dan kesuburan segera kembali setelah AKDR diangkat.
- Kondom Anda mungkin sudah tidak asing dengan alat kontrasepsi yang terbuat dari berbagai bahan yang diantaranya lateks (karet), plastic (vini), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Manfaatnya kondom sangat efektif bila digunakan dengan benar dan murah atau dapat dibeli dengan mudah.
- Tubektomi jenis kontrasepsi ini adalah prosedur bedah mini untuk memotong, mengikat atau memasang cincin pada saluran tuba fallopi untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seorang perempuan. Manfaatnya sangat efektif, baik apabila kehamilan akan terjadi resiko kesehatan yang serius dan tidak ada efek samping dalam jangka panjang
- Vasektomi merupakan alat pria jenis kontrasepsi, yaitu memutuskan saluran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan atau proses kehamilan.

Program KB alami KB ini dapat menjadi pilihan bagi mereka yang tidak ingin peserta lain, tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi, atau pada efek sampingnya KB alami ini dapat dilakukan dengan tiga cara, diantaranya:

- Tidak berhubungan intim disaat masa subur
- Menarik penis sebelum mengeluarkan sperma atau ejakulasi saat penetrasi
- Memberikan ASI eksklusif pada bayi

Perlu diketahui wanita yang hamil segera setelah mengumpulkan beresiko yang buruk mereka dapat lebih baik dari yang medis atau serius selama kehamilan. Bayi juga memiliki masalah kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 100.000 kematian ibu dapat dicegah setiap tahun, jika semua wanita yang tidak memerlukan anak lagi mampu menghindari kehamilan.

Kematian ini terjadi disebagian Negara berkembang dimana terjadi kontrasepsi rendah. Saat ini saja, jumlah kelahiran rata-rata total (TFR) pasangan suami istri masi 2,6. Sedangkan target yang harus diselesaikan adalah 2,1 TFR dari yang ditentukan 2015 lalu dan hal tersebut akan digencakan hingga tahun 2025.

### **4.3. Visi dan Misi**

Visi KB menjadi lembaga yang andal dan terpercaya dalam mencapai populasi yang berkembang dan keluarga berkualitas. Misi KB mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan, perencanaan keluarga dan kesehatan, memfasilitasi pembangunan keluarga mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan keluarga perencanaan dan pembangunan, pembangunan dan penerapan budaya kerja

### **4.4. Deskripsi Hasil Penelitian**

- Peran Pemerintah Di Kec Bangkurung Kab Banggai Laut

Pemerintah memiliki tugas yang sangat berat dalam menangani laju pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah membentuk suatu badan yang ditugaskan untuk mengatasi hal tersebut yaitu BKKBN. Dan sesuai dengan Pepres No 62 Tahun 2010. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan nasional dibidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga telah ditetapkan strategi utama dimana BKKBN, sebagai badan yang ditunjuk untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hal pertumbuhan penduduk telah mengeluarkan kebijakannya meliputi:

1. Menyerasikan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk KB
2. Menggerakkan dan memberdayakan para pemangku kepentingan, mitra kerja masyarakat
3. Menata kelembagaan
4. Memperkuat SDM
5. Meningkatkan Pembiayaan

Melihat kegiatan diatas, ditiap – tiap daerah juga memiliki kebijakan sendiri tetapi harus berdasarkan kebijakan dari pusat. Salah satunya daerah Kab Banggai Laut, dan menurun ke Kecamatan Bangkurung, sehingga pemerintah Kecamatan bisa mengontrol laju pertumbuhan penduduk dalam hal ini di gerakan oleh Pos Penyuluh KB Kec Bangkurung. Akan tetapi ketika membuat program kerja harus berdasarkan perpaduan antara kebijakan nasional dan kebijakan yang ada di daerah. Kita dapat berpendapat kalau laju pertumbuhan penduduk di Indonesia ini tidak dapat kita pungkiri boleh dikatakan sangat tinggi, seperti juga yang terdapat di Kab Banggai Laut khususnya Kecamatan Bangkurung cukup tinggi.

Hal ini dikarenakan Instansi pemerintah kurang menjalankan tugasnya dengan baik. Dari data yang diperoleh dari BPS Kecamatan Bangkurung laju pertumbuhan penduduk cukup meningkat sehingganya dibutakan tabel:

Tabel 1.4. Jumlah Pertumbuhan Penduduk

Badan Pusat Statistik (BPS)	
2015	8.582
2016	8.699
2017	8.818
2018	8932

Sumber: Kecamatan Bangkurung Dalam Angka 2019

#### **4.5. Peran, Fungsi, BKB Terhadap Pertumbuhan Penduduk**

BKKBN dan sesuai dengan Pepres No. 62 Tahun 2010. Strategi untuk Mengarahkan Kebijakan Nasional Dimana BKKBN sebagai badan yang ditunjuk

untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan populasi yang dikeluarkan kebijakannya yang dikeluarkan:

- Penyerasikan kebijakan pengendalian populasi dan pembangunan KB
- Menggerakkan dan memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholder), mitra kerja serta masyarakat
- Menata kelembagaan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai dan tenaga penyuluh
- Meningkatkan Pembiayaan

Melihat kebijakan diatas di tiap-tiap daerah juga memiliki kebijakan sendiri tetapi harus berdasarkan kebijakan dari pusat, salah satunya daerah Kab Banggai Laut. Dibenarkan pula Ketua Balai Penyuluhan KB Kec Bangkurung bapak Burahim H. Edi, SKM, Selain arah kebijakan yang dikeluarkan, BKKBN pusat juga yang didaerah harus mengerjakan tugas yang harus diselesaikan khususnya untuk daerah Kab Banggai Laut sendiri BKKBN memiliki tugas yang dapat menunjukkan apakah peran dan tugas BKKBN sebagai upaya yang meningkatkan kinerja dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan dan pertimbangan masing-masing pegawai yang memiliki peran khusus sesuai jabatan yang mereka miliki.

Dalam suatu urusan yang terkecuali Badan Keluarga Berencana untuk menjalankan tugas yang sudah ditentukan, mereka membentuk berbagai bidang yang akan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dari pusat. Dalam hal mengendalikan pertumbuhan penduduk, Badan Keluarga Berencana Kab Banggai Laut telah menentukan bidang yang akan mengatasi hal tersebut sesuai dengan

fungsi dan peran yang mereka miliki. Semua bidang yang ada di Badan Keluarga Berencana memiliki fungsi untuk mendukung pertumbuhan penduduk, namun ada beberapa hal yang sangat vital dalam hal tersebut.

- Peran, Fungsi, Tugas BKB Kec Bangkurung Kab Banggai Laut

Kita bisa mengeluarkan pendapat kalau laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak bisa kita pungkiri boleh di katakana sangat tinggi, seperti juga yang ada di Sulawesi Tengah, tapi khusus di Kec Bangkurung Kab Banggai Laut jumlah penduduk cukup pesat hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia kurang baik kemudian instansi pemerintah yang menangani persoalan ini kurang dan belum maksimal. Dari data yang diperoleh melalui metode mewawancarai responden yang berkaitan dengan hal pertumbuhan populasi yaitu Badan Keluarga Berencana atau dalam hal ini Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kec Bangkurung informan mengatakan: Jumlah penduduk khususnya di Kec Bangkurung cukup tinggi

Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh jumlah penduduk 4 tahun terakhir di Kec Bangkurung yang dapat dari BPS cukup tinggi sehingga pemerintah menganggap permasalahan ini cukup serius dan harus segera dilakukan pencegahan dengan cara pemerintah bermitra dengan Balai Penyuluhan KB yang Kec Bangkurung, mereka yang mempunyai skil untuk membuat program menekan laju pertumbuhan penduduk guna untuk mensejahterakan rakyat.

Pengumpulan data ini dimulai pada 18 November 2019 dengan menggunakan metode wawancara langsung, penulis juga mengambil data

sekunder seperti struktur organisasi, jumlah pegawai, program KB, tugas dan fungsi, dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian. Saat yang menjadi informan ataupun orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Koordinator KB Kec Bangkurung, dan Pegawai KB Kec Bangkurung.

#### **4.6. PEMBAHASAN**

A. Peran dan fungsi Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Di Kec Bangkurung.Kab Banggai Laut

Oleh karenanya BKB lebih memfokuskan pada pengaturan jarak kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penyuluhan ini tidak melarang masyarakat untung melahirkan hanya saja melakukan pembinaan dengan membatasi rentan waktu melahirkan yang baik, dan mengajarkan bagaimana menggunakan alat kontrasepsi, sehingga masyarakat lebih memahami dampak yang akan terjadi kedepannya.

Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak Burahim selaku Kordinator KB. Untuk menyikapi terlaksana dengan baik program penyuluhan ini mereka bekerja sama dengan Puskesmas dan Desa yang diadakannya program ini, tidak lupa tembusan dari Kecamatan, mereka juga melakukan pendataan perekrutan calon Aksektor KB guna terlaksananya kegiatan dengan baik.

a. Pengadaan Alat Kontrasepsi

Adanya permintaan pemerintah untuk mengontrol jumlah penduduk di Kab Banggai Laut khususnya di Kec Bangkurung menyediakan alat kontrasepsi yang sangat dibutuhkan, karena dengan alat kontrasepsi inilah masyarakat dapat

mengatasi masalah kependudukan salah satunya, Alur Informasi yang cocok sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah. Alat kontrasepsi yang digunakan juga sudah bertaraf internasional dan aman digunakan, tetapi harus sesuai dengan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak yang lebih memahami sebelum membeli, berikut ini alat - alat: IUD, Implant, Suntik, Pil, Kondom, MOP, MOW.

b. Melakukan Pendekatan Perencanaan Keluarga Secara Cermat

Perencanaan oleh keluarga dilakukan dilakukan pada perkembangan keluarga, karena dalam membuat perencanaan pada hakekatnya kita akan dihadapkan pada masalah yang mendasar (mendasar), yaitu terkait dengan tugas pengembangan manusia dalam menuju harapan sosial. Membuat rencana keluarga berdasarkan perkembangan manusia yang menjadi fokus utama yang harus dilakukan ketika menginginkan sumber daya yang dihasilkan dapat berkualitas, kompetitif, dan unggul.

Alasannya dari perkembangan-perkembangan inilah kebutuhan-kebutuhan lain yang menjadi pelengkap dalam suatu perencanaan. Dalam hal perencanaan keluarga tentang peran suami dan istri sangat penting, karena mereka dapat menentukan perbedaan antara apa yang baik untuk mereka gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, Badan Keluarga Berencana memiliki tugas untuk melakukan dan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang perencanaan keluarga yang baik.

Dalam menjalankan tugas ini Petugas Lapangan Keluarga Berencana PLKB memiliki andil yang sangat besar, karena merekalah yang langsung terjun kemasyarakat guna memberikan informasi tentang pentingnya menggunakan pil

KB. Untuk menjalankan tugas ini perlunya sosialisasi dengan masyarakat, dalam hal ini pengadaan sosialisasi yang sangat penting, sehingga masyarakat yang tadinya kurang paham ber KB sudah mulai mengetahui dan mulai mengerti bagaimana untuk ber KB, ada beberapa hal yang perlu di ketahui saat sosialisasi ber KB sabagai berikut:

- a. Sebuah perumusan kebijakan teknis
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas

Selain itu pada PLKB sendiri juga harus memiliki vokal yang cukup baik dalam kaitannya dengan masyarakat agar dapat memberikan pengarahan tentang KB, masyarakat dapat meminta maksud dan tujuan yang disampaikan PLKB memiliki fungsi yang memuat dengan upayanya yang terkait dengan masyarakat, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis khusus dalam pelaksanaan program kerja KB dilapangan
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan program kerja KB dilapangan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Melihat fungsi diatas serta menjalankan tugas yang harus dijalankan, perumusan kegiatan penilaian dilakukan untuk tujuan tercapainya tujuan yang diinginkan, khususnya pada indikator tugas kali ini PLKB akan sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan PLKB didampingi oleh pengawas dari Badan Keluarga

Berencana dan juga pengendara yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, melalui kegiatan inilah peran mereka dapat terlihat. Aktivitas yang dijalankan oleh PLKB telah terprogram di dalam program yang dibuat oleh pemerintah:

- Pembinaan Keluarga Berencana

Dalam hal ini pemerintah selaku pelaksana yang sangat berhasil, sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat agar dapat dipahami program pemerintah yang berusaha membina keluarga dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini senada dengan pertanyaan dari peneliti “Apakah sosialisasi mengenai masalah kependudukan di Kecamatan Bangkurung sudah dilakukan?”

- Sosialisasi Pergerakan Masyarakat Peduli KB Berkualitas

Dalam menggerakkan masyarakat, KB sangat dibutuhkan, karena masyarakatlah yang membutuhkan program - program yang di hasilkan oleh pihak Badan Keluarga Berencana. Hal ini bertentangan dengan pendapat dengan pegawai Muammar S,Kep yang memberikan tanggapan mengenai pertanyaan diatas, senada juga diungkapkan oleh bapak Harto sala satu pegawai Pelayanan Konseling KB

Pelayanan konseling dalam hal KB sangat penting, karena ada beberapa masyarakat yang malu mangatakan masalahnya secara terbuka, dengan adanya pelayanan khusus masyarakat juga sudah tidak merasa malu untuk mengatakan permasalahannya khususnya masalah alat-alat kontrasepsi yang aman dan baik untuk digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

- Pengelolaan Jasa Pelayanan/Pemasangan

Dalam pengelolaan ini adanya saja pelayanan/pemasangan alat kontrasepsi yang dianjurkan oleh pemerintah, sangat membantu sehingga masyarakat sudah tidak merasa takut lagi untuk menggunakan alat kontrasepsi karena adanya tenaga ahli yang diturunkan pemerintah untuk menanggulangi pelayanan ini, sehingga program pemerintah dapat menjalankan dengan baik.

- Pelayanan dan Penanggulangan Side Effect Pasca Pemasangan Alat Kontrasepsi

Demi kenyamanan masyarakat telah menggunakan alat kontrasepsi, pemerintah juga terus memantaunya dan ini dilakukan BKB Kab Banggai Laut dengan adanya pelayanan dan sosialisasi awal kepada masyarakat tentang efek yang dapat timbul setelah menggunakan alat ini sehingga masyarakat sudah siap menerima resiko yang ada.

c. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan

Pada dasarnya perempuan merupakan sosok yang boleh dikatakan lebih lemah dari pihak laki-laki. Oleh karena itu sebagian besar kalangan wanita lebih bergantung dari pihak laki-laki apalagi yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga wanita sangat berpengaruh dalam proses peningkatan jumlah penduduk, Hal ini yang mendorong Badan Keluarga Berencana untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan dan menyertakan gender.

Hal ini dilakukan dengan harapan perempuan dapat mengurangi ketergantungan dari pihak laki-laki terutama dalam urusan jumlah keturunan. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Burahim SKM. Dari hal yang disampaikan diatas dapat dilihat bahwa perempuan harus menyetarakan kedudukannya dengan pihak laki-laki sehingga dengan adanya kesetaraan gender dengan adanya perempuan inilah pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan masing-masing pihak yang secara tidak langsung keinginannya untuk dapat memiliki keturunan dapat diatur dengan hasil kesepakatan yang dibuat kedua pihak. Dari uraian diatas dapat kita katakan bahwa wanita sangatlah penting dalam kehidupan dan sangat berpengaruh dalam menentukan jumlah penduduk apakah akan bertambah atau dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan Badan Keluarga Berencana.

Agar supaya dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan, dalam hal pemberdayaan yang sangat perlu dilakukan adalah memberikan gambaran kepada perempuan bahwa dengan adanya kesetaraan gender yang dimiliki maka dapat membuat pengendalian pertumbuhan penduduk dapat terpenuhi dengan cara adanya kesepakatan yang dibuat oleh wanita dan pria yang sesuai dengan anjuran dari pihak BKB, mengenai waktu melahirkan fungsi yang harus dijalankan diantaranya:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di pemberdayaan perempuan

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kab Banggai Laut khususnya Kec Bangkurung masih perlu untuk dikendalikan apalagi jumlahnya cukup tinggi, untuk mengatasi jumlah penduduk ada beberapa terobosan program kerja yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Berencana, dan disinilah kita dapat melihat peran yang sangat penting dipegang oleh Badan Keluarga Berencana untuk mengatasi masalah ini diantaranya:

- Sebagai instansi utama membuat program penanggulangan masalah kependudukan
- Sebagai instansi yang terjun langsung dalam penyuluhan masalah kependudukan
- Sebagai penyedia data jumlah penduduk

Terlepas dari itu kita juga harus mengingat kalau peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, Berdasarkan uraian yang telah tertera maka dapat kita katakan bahwa fungsi dan peran Badan Keluarga Berencana sangatlah penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dari fungsi yang dikemukakan diatas tadi, apabila dapat berjalan dengan baik sudah dapat dipastikan bahwa pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Selain itu, tujuan fungsi yang diatas tadi sesuai dengan fungsi yang terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pasal 3 ayat (1) poin a yang

berbunyi : Perumusan kebijakan Nasional dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain fungsi yang mereka jalankan, Peran yang dimiliki Badan Keluarga Berencana dalam mengendahkan pertumbuhan penduduk juga harus diperhatikan, fungsi ini baru bisa dikatakan berjalan dengan baik ketika sudah menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ada. Salah satu cara untuk menunjukkan perannya yaitu dengan menjalankan program kerja yang telah dibuat sebelumnya. Keberhasilan program pemerintah utamanya program Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan jumlah penduduk sangat, sangat bergantung dari ikut sertanya dan kesadaran seluruh masyarakat dan di daerah Kab Banggai Laut khususnya untuk masyarakat Kec Bangkurung.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh yaitu sosialisasi langsung atau dengan kata lain terjun langsung dan bertemu langsung dengan objek yang akan diberikan pengarahan yaitu masyarakat sendiri untuk melakukan pengenalan terhadap program yang akan diterapkan. Sosialisasi ini dianggap sangat efektif untuk diterapkan bukan hanya Badan Keluarga Berencana yang melakukan hal ini tetapi hampir semua instansi melakukannya untuk mengenalkan program mereka masing-masing.

Dalam hal ini pengendalian penduduk, sosialisasi sangat dibutuhkan dan Badan Keluarga Berencana meresponnya dengan membentuk tim penyuluh yang langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Disamping tenaga penyuluh yang masih kurang serta letak topografi kawasan Kec Bangkurung yang terkenal dengan kawasan maritimnya, alokasi dana dari

pemerintah daerah juga sangat penting dalam proses penyuluhan ini. Dengan adanya komitmen serius dari pemerintah daerah untuk menanggungi masalah kependudukan, ini akan mudah juga dana kegiatan akan diperoleh.

Namun yang terjadi dilapangan dana yang dikeluarkan untuk tiap penyuluh masih sangat minim hal ini juga diungkapkan, oleh Kordinator/ ketua Balai Penyuluh KB Kec Bangkurung. Jadi boleh dikatakan kami secara tidak langsung tergantung dari kebijakan di Kabupaten itu sendiri, sehingga ini yang menjadi pengaruh dalam melaksanakan penyuluhan sehingga kadang molor atau tertunda.

#### B. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Penduduk Di Kec Bangkurung Kab Banggai Lut.

Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ketahun selalu meningkat, tidak terkecuali di Kab Banggai Laut spesial Kec Bangkurung, peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kec Bangkurung cukup meningkat sehingga pemerintah harus mengupayakan cara bagaimana mengatasi persoalan apalagi ditambah dengan tingkat sumber daya manusia masih kurang. Berkaitan dengan peningkatan jumlah pertumbuhan populasi tersebut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan populasi.

##### 1. Pernikahan Usia Dini

Menurut pandangan beberapa kalangan, pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dilakukan sebelum diputuskan untuk melakukan pernikahan, kita harus mempertimbangkannya matang dan baik sehingga dapat terskema dengan baik. Terkait dengan pemerintah pusat juga membuat peraturan tentang masalah

pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat 1 berbunyi: Perkawinan hanya dapat digunakan jika dibutuhkan pria berusia 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun. Berdasarkan Undang-Undang yang tertera maka akan dapat diterima dalam pernikahan.

Menurut Tatuhe Stephen dkk (2016:11) mengatakan bahwasanya pernikahan diusia mudah juga sering terjadi karena remaja berfikir emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir saling mendukung dan siap menikah. Disamping itu ada campur tangan orang tua dari pernikahan anak mereka juga menyangkut pernikahan yang sangat cepat. Untuk dikawasan daerah-daerah pedalaman memiliki masalah mengenai pernikahan dini, yang masih berkualitas rendah dan berkualitas, pendidikan ekonomi masih merupakan hal yang menarik.

Hal ini disebabkan karena lokasi pembahuhan sangat sulit untuk dicapai, karena akses menuju tempat tersebut masih sangat buruk. Letak topografi Kec Bangkurung yang berada di kawasan laut atau berbeda daratan dengan Ibu Kota Kabupaten, apalagi ditambah dengan gelombang laut yang tinggi sehingga ini memperlambat akses menuju Kec Bangurung.

Hal ini sangat berpengaruh untuk melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Ketua Burahim SKM

## 2. Minimnya Program Pemanfaatan Pemerintah

Masalah lain yang timbul dimasyarakat pada umumnya yang dapat meningkatkan jumlah penduduk adalah minimal yang menggunakan program

pemerintah, dan salah satunya program menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini berbanding terbalik dengan program Badan Keluarga Berencana yaitu "dua anak lebih baik" perbedaan tingkat pola masyarakat mengenai alat kontrasepsi menjadi pemicu misalnya:

- ✓ Kurang pahamnya masyarakat tertentu tentang alat kontrasepsi
- ✓ Kurang mengerti kegunaan alat kontrasepsi
- ✓ Ketakutan untuk menggunakan alat kontrasepsi

Selain itu efek yang timbul dari penggunaan alat ini masih menjadi momok dalam masyarakat kita, disamping itu hal yang menjadi hambatan adalah berkaitan dengan tenaga penyuluh, pengadaan tenaga penyuluh yang dilapangan dengan topografi seperti yang ada di Kab Banggai Laut sangat membantu serta menjadi tumpuan bagi Badan Keluarga Berencana.

Namun demikian, dalam jumlah besar, masyarakat tidak memiliki cukup banyak dana yang belum terkelola. Ini sebagaimana yang ditanyakan kepada Bapak ketua Bapak Burahim SKM

### 3. Tingkat Kelahiran yang Sangat Tinggi

Tingkat keberhasilan program pemerintah dalam peningkatan laju/ledakan penduduk masih sangat minim, salah satu pemicunya adalah jumlah kelahiran dari tahun ketahun meningkat. Hal ini karena dua hal yang terjadi di pernikahan yang dilakukan diusia muda dan tingkat penggunaan kontrasepsi yang masih rendah, dalam hal tingkat kelahiran ini tidak dihitungnya jarak kelahiran ini kita tidak tahu lagi berapa banyak jumlah penduduk Indonesia yang pada dasarnya tidak terkecuali oleh Kec Bangkurung sendiri.

Selain itu partisipasi masyarakat juga menjadi sorotan yang patut dipertimbangkan, masih mewakili masyarakat yang banyak anak rezeki, masih menentang keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah BKKBN Kab Banggai Laut. Pola yang disukai yang menjadi pekerjaan yang harus segera dihilangkan masyarakat, ditawarkan bagi masyarakat yang sulit dijangkau. Selain itu, masyarakat juga harus menghindari KB yang sesuai dengan keinginan pemerintah.

Dari beberapa tantangan yang didapat dari Badan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya, tidak terlepas dari tujuan mereka untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk. Dengan adanya keseriusan dari pemerintah dan kesediaan dari masyarakat untuk menerima program-program yang diminta oleh pemerintah telah dapat dipastikan jumlah pertumbuhan penduduk dapat disesuaikan dengan yang diinginkan oleh pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melakukan penelitian yang bertempat di Kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kec Bangkurung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi BKB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kec. Bangkurung Kab Banggai Laut yaitu masih perlu ditingkatkan kembali dikarenakan jumlah penduduk masih tinggi, sehingganya perlunya membuat evaluasi program kembali mulai dari penganggaran, sosialisasi, penyuluhan, guna menekan laju pertumbuhan penduduk di Kec Bangkurung Kab Banggai Laut
2. Faktor apa yang memengaruhi proses pengendalian pertumbuhan penduduk di Kec Bangkurung Kab Banggai Laut diantaranya migrasi terkait dengan pendapatan dan kebutuhan hidup, melakukan pembinaan keluarga berencana, pernikahan usia dini, dan angka kelahiran cukup tinggi,

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang tertera diatas maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan dari pusat maupun daerah
2. Fungsi dan Peran Badan Keluarga Berencana harus berjalan sesuai dengan masing-masing guna untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk
3. Dalam pelaksanaan proses program kerja diharapkan keikutsertaan masyarakat sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diusung oleh pemerintah
4. Dalam pelaksanaan persetujuan program kerja pemerintah daerah harus mendukung program sepenuhnya ini maka harus melihat anggaran APBD yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

- Rachmat, Gunawan. 2016. Pengantar Ilmu Pemerinthan. Pustaka Setia, Bandung
- Syafiie, Kencana. 2011. Perbandingan Pemerinthan. PT. Refika Aditama.
- Rahman. 2018. Teori Pemerintahan. UB. Press
- Riduwan. 2014. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung.
- Riduwan. Dan Kuncoro. 2012. Cara Menggunakan dan memaknai Path Analisis. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Peneitian. Alfabeta. Bandung
- Rasyid, Ryaas, dkk. 2012. Otonomi Derah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta.
- Journal
- Soares, Armando, dkk, 2015. Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Vol 4 No.2. 2015. Journal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Magister Ilmu Administrasi Politik, Universitas Brawijaya, Malang.
- Aditia, Dodit, 2013 Variabel Penelitian dan Defnisii Overasional. [www.pdfactory.com](http://www.pdfactory.com). 2013, Journal Hand Out Metodologi ,
- Ulumiyah dkk, 2014. Peran Pemerintah Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa. Vol 1 No.5. 2014. Journal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang.
- Nyoman, Suartha, 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan Dan Impementasi Kebijakan Penduduk. Vo XII No.1. 2016. Journal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi, Universiitas Ngurah Rai.

Arifin, Saidi, dkk. 2013. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa. Vol III No. 2 Oktober 2013. Journal Ilmu Pemerintahan. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah. Makassar.

Tatuhe, Stephen, 2016. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. Vol 1, No 37 2016. Journal Administrasi Publik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lcmbagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lcmbagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 1765/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kantor Keluarga Berencana (KB) Desa Lantibung

di,-

KAB. BANGGAI LAUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Sigit A. Bakalokon

NIM : S2115044

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Kantor KB Kecamatan Bangkurung, Kab. Banggai Laut

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM  
PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KEC.  
BANGKURUNG, KAB. BANGGAI LAUT

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 November 2019  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

+

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat keterangan penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA**  
**KECAMATAN BANGKURUNG**  
Alamat : Jln. Bukit Belebetu No. 1 Desa Lantibung, Kode Pos : 94892

Nomor : 800 /252/ BPKB/ 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth,  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Ichsan Gorontalo  
Di-  
Gorontalo

Mendasari surat Ketua Lembaga Penelitian Nomor : 1765/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2019 tentang Permohonan Izin Penelitian di Kantor Keluarga Berencana (KB) Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut, maka sehubungan dengan hal tersebut kami bersedia menerima dan memberikan data yang menjadi kebutuhan dalam penyusunan Proposal/Skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Moh. Sigit A. Bakalokon  
Nim : S2115044  
Fakultas : Ilmu sosial, Ilmu politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam  
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk  
Di Desa Lantibung Kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut

Dan Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di Kantor Keluarga Berencana (KB) Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Demikian di sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Lantibung, 18 November 2019

  
Koordinator Penyuluh KB  
Kecamatan Bangkurung  
**BURAHIM H. EDI, SKM**

Scanned by TapScanner

Lampiran 2. Surat rekomendasi bebas plagiasi

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN**  
**(UNISAN) GORONTALO**  
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

---

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 0010/UNISAN-G/S-BP/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MOH SIGIT A. BAKALOKON  
NIM : S2115044  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Analisis Peran Pemerintahan Dalam Pengendalian  
Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Banggai Laut  
Kecamatan Bangkuring (khususnya Desa Lantibung)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 March 2020  
Tim Verifikasi,  
  
**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN: 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Scanned by TapScanner

Lampiran 3. Riwayat hidup

**Nama** : Moh Sigit A. Bakalokon

**NIM** : S2115044

**Fakultas Politik** : Ilmu Sosial Dan Ilmu

**Program Studi** : Ilmu Pemerintahan

**Tempat Tanggal Lahir** : Lantibung, 26 Juli 1997

- **Ayah** : Arpan Bakalokon

- **Ibu** : Nurmila Latere

**Saudara**

**Kakak** : Siti Arni Bakalokon

**Adik** : -

**Suami/istri** : -

**Anak** : -

**Riwayat Pendidikan** : -



<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JENJANG</b>	<b>TEMPAT</b>	<b>KET</b>
1	2009	SD INPRES LANTIBUNG	Kec. Bangkurung	Berijazah
2	2012	SMPN 1 BANGKURUNG	Kec. Bangkurung	Berijazah
3	2015	SMAN 1 BANGKURUNG	Kec. Bangkurung	Berijazah
4	2020	FISIP UNISAN GORONTALO	Kota Gorontalo	Berijazah

Lampiran 4. Dokumentasi



lampiran 5. Struktur organisasi

